



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARPONO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 761065

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/80 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 503 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/42 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **233.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000



3. MOTOR, HONDA P5E02R22M1 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 125.635.135

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.142.135.135

III. HUTANG

Rp. 200.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.941.335.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.